



Evaluasi Program Feeder Wira-Wiri Sebagai Transportasi Umum Terintegrasi di Kota Surabaya

Syaroni¹, Aliza Putri Amelia², Intan Nia Putri³, Muhammad Fauzan Al Angsyari⁴, Tauran⁵, Wilda Sumarsyah⁶

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi : 24040674194@mhs.unesa.ac.id, 24040674175@mhs.unesa.ac.id, 24040674176@mhs.unesa.ac.id, tauran@unesa.ac.id, wildasumarsyah@unesa.ac.id.

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

Public transportation has a strategic role in supporting urban community mobility and realizing a sustainable transportation system. The Surabaya City Government developed the Wira Wiri Suroboyo Feeder Program as a feeder transportation service aimed at expanding service coverage, improving intermodal connectivity, and supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly target 11.2. This study aims to evaluate the level of success in the implementation of the Wira Wiri Suroboyo Feeder Program based on William N. Dunn's formal evaluation approach, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The study employed a qualitative approach with a formative evaluation type. Data were obtained through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model. The results show that the Wira Wiri Suroboyo Feeder Program has demonstrated a fairly effective implementation in supporting public transportation connectivity through 12 active corridors. However, several obstacles were still identified, such as unsynchronized intermodal schedules, limited reserve fleets, and service distribution that has not been fully equitable, especially in the North Surabaya area. Overall, the program is considered fairly effective, efficient, adequate, equitable, responsive, and well-targeted, although it still requires strengthening in operational aspects to optimize its contribution to inclusive and sustainable urban transportation development.

Keywords: Policy Evaluation, Public Transportation, Wira Wiri Feeder Program, SDGs, Formal Evaluation.

ABSTRAK

Transportasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan serta mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan Program Feeder Wira Wiri Suroboyo sebagai layanan transportasi pengumpan yang bertujuan memperluas jangkauan pelayanan, meningkatkan konektivitas antarmoda, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 11.2. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi Program Feeder Wira Wiri Suroboyo berdasarkan pendekatan evaluasi formal menurut William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis evaluasi formatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Feeder Wira Wiri Suroboyo telah menunjukkan

implementasi yang cukup efektif dalam mendukung konektivitas transportasi publik melalui 12 koridor aktif. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kendala, seperti ketidaksinkronan jadwal antarmoda, keterbatasan armada cadangan, serta distribusi layanan yang belum sepenuhnya merata, terutama pada wilayah Surabaya Utara. Secara keseluruhan, program ini dinilai cukup efektif, efisien, memadai, merata, responsif, dan tepat sasaran, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek operasional guna mengoptimalkan kontribusinya terhadap pembangunan transportasi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Transportasi Publik, Program Feeder Wira Wiri, SDGs, Evaluasi formal.*

PENDAHULUAN

Transportasi publik didefinisikan sebagai sarana perpindahan yang digunakan masyarakat tanpa menggunakan kendaraan pribadi (Arifin *et al.*, 2023). Dalam penyelenggaraannya, pemerintah memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 138 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan angkutan umum untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Margaretha dan Nugroho (2024) menyebutkan bahwa transportasi publik yang efisien dan terintegrasi memiliki peran penting dalam merealisasikan visi *Smart City*. Selain itu, transportasi publik juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peningkatan investasi daerah (Putri, 2022).

Tingginya aktivitas masyarakat di wilayah perkotaan menyebabkan kebutuhan mobilitas semakin meningkat dan memunculkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas. Kondisi ini juga terjadi di Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Novita (2023) menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menjadi salah satu penyebab utama munculnya permasalahan transportasi di kawasan perkotaan, khususnya di Kota Surabaya, yang berdampak pada terjadinya kemacetan lalu lintas. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik kota metropolitan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi serta aktivitas ekonomi yang padat sehingga meningkatkan volume pergerakan kendaraan di jalan. Apabila tidak segera ditangani, peningkatan volume kendaraan akan memperparah kemacetan dan memperpanjang waktu tempuh perjalanan. Sehingga ketersediaan transportasi umum yang memadai, terjangkau, dan mudah diakses diperlukan untuk mendukung kelancaran mobilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menghadirkan inovasi dalam sektor transportasi publik, salah satunya adalah layanan *Feeder Wira Wiri* yang diresmikan oleh Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya pada 2 Maret 2023 (Surabaya.go.id, 2023). *Feeder Wira Wiri* merupakan layanan transportasi pengumpan yang dirancang untuk melengkapi sistem

transportasi yang sudah ada di Kota Surabaya, seperti Suroboyo Bus, Trans Jatim, dan Bus Trans Semanggi. Kehadiran layanan ini difokuskan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani transportasi bus besar, terutama kawasan permukiman dengan akses jalan yang sempit. Dengan demikian, Wira Wiri berperan penting dalam memudahkan mobilitas masyarakat sekaligus memperluas jangkauan layanan transportasi publik di perkotaan.

Pelaksanaan program Feeder Wira Wiri diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur besaran tarif serta kontribusi sampah sebagai bagian dari layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum di bawah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan angkutan, tetapi juga bertujuan membentuk sistem transportasi yang lebih terintegrasi antara *feeder* wira-wiri, Suroboyo Bus, Trans Jatim dan Trans Semanggi. Integrasi antarmoda merupakan hal penting dalam menciptakan sistem transportasi perkotaan yang efisien dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus meningkat. Sebagaimana dikemukakan oleh Rohmah *et al.* (2024) bahwa integrasi transportasi publik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas layanan serta mendukung terciptanya sistem transportasi yang berkelanjutan di wilayah perkotaan.

Program *Feeder* Wira Wiri diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai pelaksana teknis utama. Dan pengelolaan operasional harian dijalankan oleh UPTD Pengelolaan Transportasi Umum (PTU). Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), mulai dari Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya, UPTD PTU sebagai pengelola operasional, Operator dari pihak swasta sebagai penyedia layanan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Kelompok sasaran program ini adalah seluruh masyarakat Kota Surabaya khususnya pada usia produktif yang memiliki mobilitas yang tinggi.

Pembiayaan Wira Wiri didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Untuk unit yang asetnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya, pengadaan sepenuhnya dari APBD. Untuk biaya operasional dan pemeliharaan (*maintenance*) dibiayai dari pendapatan BLUD yang bersumber dari layanan seperti penjualan tiket. Sedangkan aset kendaraan yang dioperasikan melalui kerja sama dengan pihak swasta (*by the service*), biaya operasional atau Biaya Operasional Kendaraan (BOK) tetap bersumber dari APBD. Pada tahap awal, sebanyak 36 unit Feeder yang bersumber dari APBD tahun 2022 senilai Rp 25 miliar telah siap dikirim pada akhir Desember 2022. Kemudian pada tahun 2023, jumlah pengadaan ditambah hingga menjadi total 52 unit melalui penggabungan anggaran APBD tahun 2022–2023 dengan nilai sekitar Rp 34 miliar (Novantiko *et al.*, 2024).

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut William N. Dunn, evaluasi formal dilakukan dengan membandingkan hasil implementasi kebijakan dengan tujuan normatif yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat diidentifikasi tingkat keberhasilan maupun kesenjangan antara tujuan

kebijakan dengan realitas implementasi. Dalam konteks pembangunan perkotaan, evaluasi kebijakan transportasi publik menjadi semakin strategis karena transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga berperan dalam mendukung efisiensi perkotaan, pemerataan akses layanan publik, pengurangan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kota Surabaya sebagai salah satu pusat pertumbuhan metropolitan di Provinsi Jawa Timur menghadapi dinamika mobilitas perkotaan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, permukiman, dan pergerakan masyarakat antarkawasan. Kondisi tersebut menuntut tersedianya sistem transportasi publik yang tidak hanya mampu menjangkau pusat-pusat aktivitas utama, tetapi juga mampu menghubungkan kawasan permukiman dengan simpul transportasi publik secara terintegrasi.

Kebijakan transportasi publik juga memiliki keterkaitan erat dengan agenda *United Nations Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*), terutama target 11.2 yang menekankan penyediaan sistem transportasi publik yang aman, inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan. Dalam mendukung target tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan Program *Feeder Wira Wiri Suroboyo* sebagai layanan pengumpan yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar moda transportasi publik, memperluas jangkauan layanan, serta menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat hingga kawasan pemukiman.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan peneliti, sebagian besar penelitian terkait evaluasi transportasi publik lebih banyak menekankan pada aspek kualitas pelayanan, kepuasan pengguna, maupun efektivitas operasional. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan pendekatan evaluasi formal menurut William N. Dunn dengan perspektif pembangunan berkelanjutan, khususnya pada layanan *feeder* transportasi perkotaan, masih belum banyak ditemukan. Di sisi lain, berbagai indikasi empiris di lapangan menunjukkan bahwa implementasi Program *Feeder Wira Wiri Suroboyo* masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti sinkronisasi waktu antar moda, keterbatasan frekuensi layanan pada periode antar wilayah pelayanan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya potensi kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan implementasi aktual di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Program *Feeder Wira Wiri Suroboyo* menggunakan pendekatan evaluasi formal sekaligus menganalisis kontribusinya terhadap pencapaian target SDG 11. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa integrasi antara evaluasi formal kebijakan publik dan perspektif pembangunan berkelanjutan pada konteks layanan *feeder* transportasi perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat keberhasilan implementasi Program *Feeder Wira Wiri Suroboyo* berdasarkan enam kriteria evaluasi formal menurut William

N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan?

2. Sejauh mana target SDG 11, khususnya target 11.2 terkait penyediaan transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan?

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi Program *Feeder Wira Wiri Suroboyo* berdasarkan enam kriteria evaluasi formal menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana program ini berkontribusi terhadap pencapaian target SDG 11.2, khususnya penyediaan sistem transportasi publik yang aman, inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Tujuan evaluasi secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tingkat efektivitas program dalam mencapai tujuan normatif, seperti peningkatan aksesibilitas ke berbagai kawasan di Surabaya dan integrasi antar moda transportasi.
2. Mengevaluasi kecukupan layanan dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat usia produktif di Surabaya.
3. Menganalisis pemerataan distribusi layanan, dengan fokus pada keterbatasan anggaran dan cakupan wilayah yang belum merata.
4. Menilai responsivitas program terhadap umpan balik pengguna terkait waktu tunggu dan integrasi dengan Suroboyo Bus, Trans Jatim, serta Trans Semanggi.
5. Mengukur ketepatan kebijakan sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 dalam mendukung visi *Smart City* dan SDG 11.

Ruang lingkup evaluasi kebijakan dalam penelitian ini meliputi kualitas pelayanan, efisiensi, dan pemerataan layanan dari Program *Feeder Wira Wiri*. Evaluasi difokuskan pada permasalahan keterbatasan anggaran yang menyebabkan distribusi layanan wira wiri yang tidak merata dan keterbatasan sumber daya operasional. Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti waktu operasi *feeder wira wiri* yang belum terintegrasi dengan transportasi umum lainnya seperti Trans Jatim, Trans Semanggi dan Surabaya Bus sehingga waktu tunggu dari penumpang cenderung lama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Program *Feeder Wira Wiri Suroboyo* berdasarkan fakta empiris, persepsi informan, serta berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Desain deskriptif-evaluatif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual implementasi program sekaligus mengidentifikasi berbagai dinamika, kendala, dan capaian program berdasarkan temuan lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Transportasi Umum (UPTD PTU) Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai

instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional Program Feeder Wira Wiri Suroboyo. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada bulan April 2026.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai human instrument yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi program berdasarkan perspektif para informan.

Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan relevansi, pengetahuan, serta keterlibatan langsung terhadap fokus penelitian (Creswell, 2014). Informan dalam penelitian ini meliputi petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan operasional Program Feeder Wira Wiri Suroboyo.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung pada lingkungan kelembagaan penelitian dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai sistem pengelolaan program, mekanisme operasional, serta proses evaluasi internal pada instansi pengelola. Sementara itu, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait implementasi program, capaian layanan, kendala operasional, distribusi layanan, serta berbagai dinamika pelaksanaan program.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur yang meliputi artikel ilmiah, laporan resmi, dokumen kebijakan, data koridor layanan, serta berbagai publikasi yang berkaitan dengan Program Feeder Wira Wiri Suroboyo. Informasi terkait distribusi koridor, cakupan wilayah pelayanan, dan dinamika operasional program diperoleh melalui triangulasi antara hasil wawancara dengan informan dan analisis dokumen pendukung.

Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur sehingga konsistensi informasi yang diperoleh dapat diuji secara komprehensif (Denzin, 1978).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tahap pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification). Proses analisis dilakukan secara simultan sejak data mulai diperoleh hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai implementasi Program Feeder Wira Wiri Suroboyo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi formal menurut William N. Dunn yang terdiri atas enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria tersebut digunakan

untuk menilai sejauh mana implementasi Program Feeder Wira Wiri Suroboyo mampu mencapai tujuan normatif kebijakan sekaligus mendukung pencapaian target transportasi keberlanjutan dalam SDG 11. Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan peneliti, sebagian besar penelitian terkait evaluasi transportasi publik lebih banyak menekankan pada aspek kualitas pelayanan, kepuasan pengguna, maupun efektivitas operasional. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan pendekatan evaluasi formal menurut William N. Dunn dengan perspektif pembangunan berkelanjutan, khususnya formal menurut William N. Dunn dengan perspektif pembangunan berkelanjutan, khususnya pada layanan feeder transportasi perkotaan, masih belum banyak ditemukan

1. Efektivitas

Secara normatif, program Feeder Wira Wiri Suroboyo dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar moda transportasi publik, memperluas akses layanan hingga kawasan pemukiman, serta mendukung mobilitas masyarakat perkotaan secara lebih terintegrasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada beberapa koridor aktif yang menjadi lokasi pengumpulan data, didukung oleh wawancara dengan pengguna layanan dan petugas operasional, program telah menunjukkan capaian implementasi melalui tersedianya 12 koridor layanan yang menghubungkan berbagai simpul transportasi strategis di Kota Surabaya.

Namun demikian, temuan lapangan juga menunjukkan masih terdapat ketidaksinkronan waktu kedatangan antara armada feeder dengan moda utama, keterbatasan frekuensi layanan pada periode operasional padat, serta ketidakpastian waktu tempuh akibat kepadatan lalu lintas perkotaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa output kebijakan telah terealisasi melalui penyediaan layanan, namun outcome berupa kemudahan mobilitas dan integrasi layanan antar moda belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan perbandingan antara tujuan normatif kebijakan dengan temuan empiris di lapangan, implementasi program menunjukkan kondisi yang cukup efektif, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek sinkronisasi operasional dan kepastian layanan.

2. Efisiensi

Dari aspek efisiensi, hasil wawancara dengan pihak operasional menunjukkan adanya keterbatasan jumlah armada cadangan, kebutuhan penyesuaian jumlah pengemudi sesuai dinamika pelayanan, serta keterbatasan sumber daya operasional yang berdampak terhadap fleksibilitas pengembangan layanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan input sumber daya terhadap output pelayanan belum sepenuhnya optimal, khususnya pada periode dengan intensitas mobilitas masyarakat yang tinggi.

Berdasarkan hubungan antara sumber daya yang tersedia capaian pelayanan yang dihasilkan, implementasi program menunjukkan kondisi yang cukup efisien, namun masih memerlukan optimalisasi dalam pengalokasian sumber daya operasional agar pelayanan dapat berlangsung secara lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Berdasarkan pemetaan terhadap 12 koridor aktif, layanan Program Wira Wiri Suroboyo telah menjangkau sebagian besar wilayah Surabaya Barat, Selatan, dan Timur, seperti Benowo, Lakarsantri, Gunung Anyar, Keputih, hingga Purabaya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya perluasan akses transportasi publik menuju kawasan permukiman maupun pusat aktivitas masyarakat.

Namun demikian, hasil observasi lapangan pada koridor yang terhubung dengan kawasan utara menunjukkan bahwa keterjangkauan layanan di beberapa wilayah Surabaya Utara masih relatif terbatas dan sebagian besar masih berfungsi sebagai lintasan penghubung, bukan wilayah pelayanan dominan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi feeder sebagai solusi *last mile transportation* belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan kemampuan program dalam menjawab persoalan aksesibilitas transportasi publik, implementasi kebijakan menunjukkan kondisi yang cukup memadai, meskipun cakupan spasial layanan masih memerlukan penguatan.

4. Pemerataan (*Equity*)

Dalam perspektif evaluasi formal menurut William N. Dunn, pemerataan (*equity*) digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat kebijakan telah terdistribusi secara proporsional kepada seluruh kelompok maupun wilayah sasaran. Untuk mengidentifikasi distribusi spasial layanan Program Feeder Wira Wiri Suroboyo, dilakukan pemetaan terhadap 12 koridor aktif berdasarkan wilayah dominan pelayanan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Table : 1 Distribusi Spasial Koridor Program Feeder Wira Wiri Suroboyo Berdasarkan Wilayah Pelayanan

Wilayah Pelayanan	Jumlah Koridor Teridentifikasi	Kode Koridor	Proporsi Keterhubungan Koridor
Surabaya Barat	6	FD01, FD02, FI06, FD08, FD09	50,0%
Surabaya Timur	6	FD03, FD04, FI06, FD08, FD09, FD10, FD11, FD12	50,0%
Surabaya Selatan	4	FD03, FD06, FI06, FD08, FD09, FD12	33,3%
Surabaya Utara	2	FD11, FD12	16,7%

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan data koridor aktif Program Feeder Wira Wiri Suroboyo, 2026.

Berdasarkan pemetaan tersebut, koridor layanan teridentifikasi pada seluruh wilayah utama Kota Surabaya dengan jumlah keterhubungan yang berbeda pada masing-masing wilayah pelayanan.

5. Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara lapangan, pengelola Program Feeder Wira Wiri Suroboyo telah melakukan monitoring operasional secara rutin melalui evaluasi unit

pelayanan dan pelaporan operasional. Selain itu, pengelola juga menerima berbagai masukan dari masyarakat pengguna layanan sebagai bagian dari proses perbaikan pelayanan publik.

6. Ketepatan (Appropriateness)

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan dokumentasi program, Program Feeder Wira Wiri Suroboyo merupakan layanan transportasi publik yang dirancang untuk mendukung integrasi antar moda, memperluas jangkauan pelayanan transportasi publik, serta menghubungkan kawasan permukiman dengan berbagai simpul transportasi strategis di Kota Surabaya. Program ini juga terintegrasi dengan sistem transportasi publik perkotaan yang telah beroperasi sebelumnya.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi formal menurut William N. Dunn yang terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria tersebut digunakan untuk membandingkan tujuan normatif Program Feeder Wira Wiri Suroboyo dengan temuan empiris di lapangan, sehingga dapat diidentifikasi sejauh mana implementasi kebijakan telah mampu menjawab kebutuhan transportasi publik perkotaan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Efektivitas (Effectiveness)

Berdasarkan hasil temuan lapangan, Program Feeder Wira Wiri Suroboyo telah menunjukkan implementasi kebijakan melalui tersedianya 12 koridor aktif yang menghubungkan berbagai simpul transportasi strategis di Kota Surabaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa output kebijakan berupa penyediaan layanan transportasi pengumpan telah terealisasi sesuai desain program.

Namun demikian, temuan lapangan juga menunjukkan masih terdapat ketidaksinkronan waktu kedatangan antara armada feeder dengan moda utama, keterbatasan frekuensi layanan pada periode operasional padat, serta ketidakpastian waktu tempuh akibat kepadatan lalu lintas perkotaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa outcome kebijakan berupa kemudahan mobilitas, kepastian layanan, dan integrasi antar moda belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan perbandingan antara tujuan normatif kebijakan dengan temuan empiris di lapangan, implementasi Program Feeder Wira Wiri Suroboyo menunjukkan kondisi yang cukup efektif, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek sinkronisasi operasional, pengaturan headway layanan, dan kepastian waktu pelayanan.

2. Efisiensi (Efficiency)

Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi program masih menghadapi keterbatasan jumlah armada cadangan, kebutuhan penyesuaian jumlah pengemudi sesuai dinamika pelayanan, serta keterbatasan sumber daya operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pelayanan publik telah berjalan, namun fleksibilitas operasional masih dipengaruhi oleh ketersediaan input pelayanan.

Dalam perspektif evaluasi formal, efisiensi tidak hanya diukur dari tersedianya output layanan, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan manfaat pelayanan secara maksimal. Berdasarkan hubungan antara sumber daya yang tersedia dengan capaian pelayanan yang dihasilkan, implementasi program menunjukkan kondisi yang cukup efisien, meskipun optimalisasi pengalokasian sumber daya operasional masih diperlukan agar pelayanan dapat berlangsung secara lebih adaptif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat.

3. Kecukupan (Adequacy)

Hasil temuan menunjukkan bahwa layanan Program Feeder Wira Wiri Suroboyo telah menjangkau sebagian besar wilayah Surabaya Barat, Selatan, dan Timur melalui koridor yang terhubung dengan kawasan permukiman maupun pusat aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperluas akses transportasi publik menuju wilayah pelayanan yang memiliki intensitas mobilitas tinggi.

Namun demikian, keterjangkauan layanan pada beberapa wilayah Surabaya Utara masih relatif terbatas dan sebagian besar koridor masih berfungsi sebagai lintasan penghubung antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi feeder sebagai solusi last mile transportation belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan aksesibilitas transportasi publik secara menyeluruh.

Berdasarkan kemampuan program dalam menjawab persoalan aksesibilitas transportasi publik, implementasi kebijakan menunjukkan kondisi yang cukup memadai, meskipun cakupan spasial layanan masih memerlukan penguatan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih merata pada seluruh wilayah pelayanan.

4. Pemerataan (Equity)

Berdasarkan pemetaan distribusi koridor pada Tabel 3, layanan Program Feeder Wira Wiri Suroboyo telah teridentifikasi pada seluruh wilayah utama Kota Surabaya. Namun, distribusi koridor menunjukkan adanya kecenderungan konsentrasi pelayanan pada wilayah Surabaya Barat, Timur, dan Selatan, sedangkan wilayah Surabaya Utara masih menunjukkan representasi koridor yang relatif lebih terbatas.

Wilayah Surabaya Utara hanya teridentifikasi melalui koridor FD11 dan FD12 yang sebagian besar berfungsi sebagai lintasan penghubung antarkawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi spasial layanan antarwilayah telah menunjukkan upaya pemerataan layanan secara luas, namun belum sepenuhnya proporsional apabila dibandingkan dengan kebutuhan akses transportasi publik pada seluruh wilayah administratif kota.

Berdasarkan perbandingan antara tujuan pemerataan pelayanan dengan distribusi implementasi di lapangan, pelaksanaan program menunjukkan kondisi yang cukup merata, meskipun prinsip keadilan distribusi pelayanan publik secara spasial belum sepenuhnya tercapai.

5. Responsivitas (Responsiveness)

Hasil temuan menunjukkan bahwa pengelola program telah melakukan monitoring operasional secara rutin, evaluasi unit pelayanan, serta menerima berbagai masukan dari masyarakat pengguna layanan sebagai bagian dari proses perbaikan pelayanan publik.

Namun demikian, beberapa kebutuhan pengguna, seperti penyesuaian jadwal terhadap kondisi lalu lintas, penambahan armada pada periode operasional padat, serta peningkatan kepastian waktu kedatangan, belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti secara cepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme respon organisasi telah berjalan, namun kapasitas adaptasi terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik masih memerlukan penguatan.

Berdasarkan kemampuan program dalam merespons kebutuhan masyarakat, implementasi kebijakan menunjukkan kondisi yang responsif, meskipun belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik.

6. Ketepatan (Appropriateness)

Secara konseptual, Program Feeder Wira Wiri Suroboyo dirancang untuk memperkuat integrasi antar moda transportasi publik, memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi publik, serta menghubungkan kawasan permukiman dengan berbagai simpul transportasi strategis di Kota Surabaya. Desain kebijakan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang semakin kompleks.

Kebijakan ini juga memiliki relevansi yang kuat terhadap target 11.2 dari agenda United Nations SDG 11, yaitu penyediaan sistem transportasi publik yang aman, inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan. Namun demikian, berbagai kendala implementasi yang masih ditemukan menunjukkan bahwa kontribusi program terhadap pencapaian target tersebut belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan kesesuaian antara desain kebijakan dengan permasalahan publik yang dihadapi, implementasi program menunjukkan kondisi yang tepat secara konseptual, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi operasional agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Program Feeder Wira Wiri Suroboyo menggunakan enam kriteria evaluasi formal menurut William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam aspek desain kebijakan yang tepat sasaran (appropriateness) dalam menjawab kebutuhan konektivitas serta memperluas aksesibilitas transportasi publik di Kota Surabaya. Secara operasional, program ini dinilai cukup efektif, efisien, memadai, dan responsif, meskipun masih ditemukan kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan implementasi aktual di lapangan, khususnya terkait ketidaksinkronan waktu operasional antarmoda dan distribusi spasial armada yang belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah, terutama Surabaya Utara. Dalam konteks pencapaian target SDG 11.2, Program Feeder Wira Wiri telah memberikan kontribusi positif sebagai layanan pengumpan (feeder) yang mendukung sistem

transportasi berkelanjutan. Namun, optimalisasi kontribusi tersebut masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya operasional dan kepadatan lalu lintas yang berdampak pada ketidakpastian waktu tempuh. Dengan demikian, meskipun secara konseptual program ini sangat relevan dengan visi pembangunan transportasi perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan perbaikan berkelanjutan pada aspek operasional untuk memaksimalkan outcome kebijakan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi dan temuan di lapangan, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja Program Feeder Wira Wiri Suroboyo: (1) Penguatan Integrasi Antarmoda, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan perlu melakukan sinkronisasi jadwal operasional yang lebih ketat dan sistemik antara armada Feeder Wira Wiri dengan moda transportasi utama (Suroboyo Bus, Trans Jatim, dan Trans Semanggi). Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi manajemen transportasi terpadu yang menyediakan real-time tracking dan jadwal kedatangan yang pasti bagi pengguna, sehingga mampu meminimalisasi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat. (2) Penambahan Anggaran untuk Distribusi Armada, Dinas Perhubungan disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap alokasi anggaran, terutama untuk pengadaan dan penambahan armada cadangan guna memperkuat cakupan layanan pada koridor-koridor yang memiliki tingkat permintaan tinggi maupun wilayah yang saat ini masih memiliki keterbatasan akses, khususnya di kawasan Surabaya Utara. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat mendukung fleksibilitas operasional, penambahan frekuensi layanan pada jam sibuk, serta memastikan distribusi layanan yang lebih proporsional dan adil secara spasial di seluruh wilayah Kota Surabaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Gottschalk, P. (2005). *Strategic Knowledge Management Technology*. Hershey PA: Idea Group Publishing.
- Arifin, P., Muhafidin, D., & Pancasilawan, R. (2023). Evaluasi kebijakan transportasi Indonesia: Studi literatur review pembelajaran dengan Korea Selatan. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(3).
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Laode, R., Satyadharma, M., Wuga, L., & Hado. (2025). Pengembangan Transportasi dan Dampaknya terhadap Sektor Ekonomi (Kajian Literatur). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.53697/emba.v5i2.2994>
- Margaretha, A. M., & Nugroho, A. A. (2023). Transportasi publik terintegrasi: Optimalisasi implementasi smart mobility di DKI Jakarta. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 5(2), 47–58.
- Novantiko, K., Pramono, S., & Roekminiati, S. (2024). Efektivitas kebijakan feieder Wira-Wiri Suroboyo dalam mengentaskan kemacetan dan disparitas transportasi di Kota Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 209–224.

- Putri, N.I. (2022). Pengaruh Transportasi Umum Terhadap Perkembangan Antar Wilayah Administrasi di Jakarta. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*.
- Rohmah, W., Ramadhani, M., & Winarno, B. (2024). Pentingnya integrasi transportasi publik di Kota Surakarta sebagai kota urbanisasi di Jawa Tengah. *Jurnal Bengawan Solo: Pusat Kajian Riset dan Inovasi Daerah Kota Surakarta*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.58684/jbs.v3i1.49>
- Sugiyono, (2022), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Zalukhu, M. H., Laia, B., Waruwu, E., Lase, D., & Mendrofa, K. B. (2025). Perencanaan transportasi jalan perkotaan: Strategi dan tantangan dalam mewujudkan mobilitas berkelanjutan. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(1).
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.